



Survei  
Penilaian  
**Integritas**

**Sosialisasi Hasil dan Tindak Lanjut  
Hasil Survei 2018**

**2019**

**Direktorat Penelitian dan Pengembangan  
Kedeputian Bidang Pencegahan**

# Topik Pembahasan Agenda



**Metode dan  
Desain Riset**



**Sekilas Kegiatan**



**Hasil 2019**



**Diskusi dan  
Tanya Jawab**



# **Sekilas Kegiatan**

**Survei Penilaian Integritas**

## Sekilas

Survei Penilaian  
Integritas (SPI



**Survei** yang dilakukan  
terhadap **inststitusi** untuk  
**memetakan** dan  
**mencegah korupsi**



# **Kegunaan** Survei Penilaian Integritas (SPI



**Identifikasi Area  
Rentan Korupsi**

**Indikator Keberhasilan  
Pencegahan Korupsi**

# Siapa yang menilai Survei Penilaian Integritas (SPI)?



**Pegawai**



**Pengguna  
Layanan**

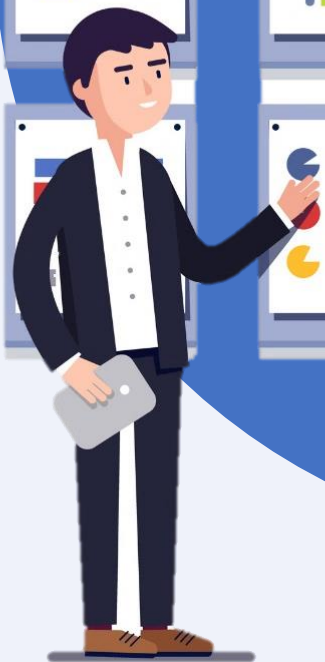


**Narasumber  
Ahli**



# Metode dan Desain Penelitian

Survei Penilaian Integritas



## Bagaimana Penilaian Dilakukan? Survei Penilaian Integritas (SPI)

- Pelaksanaan dibantu oleh Pihak Ketiga (BPS)
- Metode Survei dan Wawancara Mendalam
- Pengambilan Sampel Responden Acak
- Pengumpulan Data Menggunakan Gadget (CAPI).
- Skala Indeks 0-100



**Pada setiap K/L/PD, Unit Kerja apa saja yang dinilai?  
Survei Penilaian Integritas (SPI)**

1. Unit kerja utama
2. Memiliki dampak berarti pada penciptaan kepercayaan publik jika dilakukan perbaikan dalam konteks pencegahan korupsi (anggaran terbesar, jumlah pengguna layanan besar dll)



# Dimensi Penilaian Integritas SPI

SISTEM ANTI KORUPSI

PENGELOLAAN SDM



PENGELOLAAN ANGGARAN



BUDAYA ANTI KORUPSI





**26 K/L/PD**



**130 responden  
untuk masing-  
masing lokus**

# **Ruang Lingkup SPI 2018**



**Responden dipilih  
secara Acak**



**Pegawai , Pengguna  
Layanan dan Narasumber  
Ahli**



## Tujuan

Mendapatkan nilai integritas organisasi



## Responden

### Sampling:

#### Internal Responden :

1. Pria/Wanita
2. Masa kerja minimal 1 tahun dan memberikan pelayanan dalam unit yang disampel
3. Proporsional berdasarkan jenjang jabatan

#### Eksternal Responden :

1. Pria/Wanita
2. Memiliki pengalaman dilayani oleh unit minimal 1x dalam 12 bulan terakhir
3. Mengurus pelayanan sendiri tanpa melalui biro jasa/calor



Pemda dan KL  
**Organisasi**



**Metodologi**  
Survei

## Kuisisioner

Penggunaan Gadget



**Waktu**

September-Oktober  
2018

# Desain Riset

# Target Sampel SPI 2018

## 6 Kementerian/ Lembaga

- Mahkamah Agung
- Kepolisian RI
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Keuangan (Dirjen Bea Cukai)
- Badan Pertahanan Nasional (BPN)

## 20 Pemerintah Provinsi

- Provinsi Aceh
- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Riau
- Provinsi Jambi
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Banten
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Pemerintah Provinsi Banten
- Provinsi Bengkulu
- Provinsi Kepulauan Riau
- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Gorontalo

# Lokus Sampel Penelitian di Lembaga

## Organisasi

## Unit Kerja

### Mahkamah Agung

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

### Kementerian Kesehatan

Dit. Penilaian Alkes dan PKRT  
Dit. Pengawasan Alkes dan PKRT

### Kementerian Perhubungan

Dit. Perkapalan dan Kepelautan  
Dit. Angkutan Udara

### Kementerian Keuangan (Dirjen Bea Cukai)

KPU-BC Tanjung Priok  
KPU-BC Bandara Soekarno-Hatta

### Badan Pertanahan Nasional

KPPBC Cikarang  
BPN Jakarta Selatan  
BPN Jakarta Timur  
Kanwil BPN DKI Jakarta

### Pemerintah Daerah (Provinsi)

Dinas PU (Bina Marga)  
Dinas Perhubungan  
Dinas Kesehatan  
Dinas Pendapatan Daerah  
PTSP  
ULP

Indeks yang dihasilkan hanya menggambarkan kondisi integritas pada lokus survei sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk penilaian K/L/PD secara umum.



# Hasil

Survei Penilaian Integritas

# **Profil Responden**

**Internal**

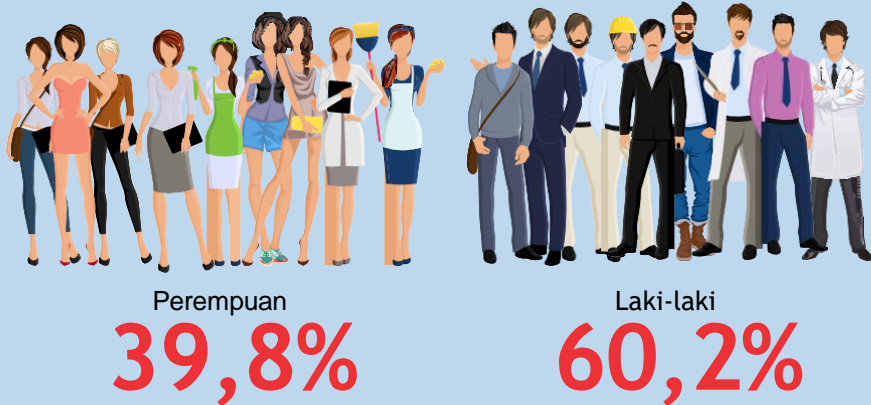
**Eksternal**

**Eksper**



# Profil Responden (Internal)

## Jenis Kelamin



## Usia



## Jabatan



<b>8,3%</b> Setara Eselon I/II Pejabat Utama/Pratama	<b>1,2%</b> Setara Eselon V/Kaur/ Pelaksana
<b>9,2%</b> Setara Eselon III/ Pejabat Administrator	<b>61,3%</b> Staf/ fungsional umum
<b>12,4%</b> Setara Eselon IV/ Pejabat Pengawas	<b>7,7%</b> Fungsional tertentu

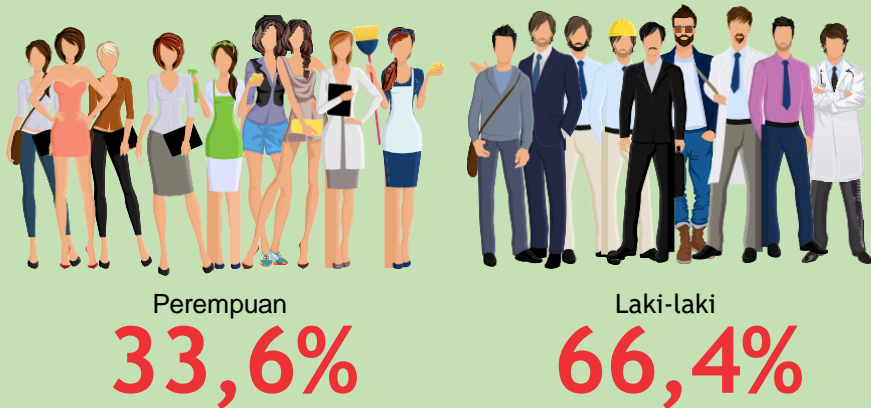
## Pendidikan



SMP atau lebih rendah <b>0,3%</b>	Sarjana <b>42,5%</b>
SMA <b>12,5%</b>	Pascasarjana <b>34,9%</b>
Diploma <b>9,8%</b>	

# Profil Responden (Eksternal)

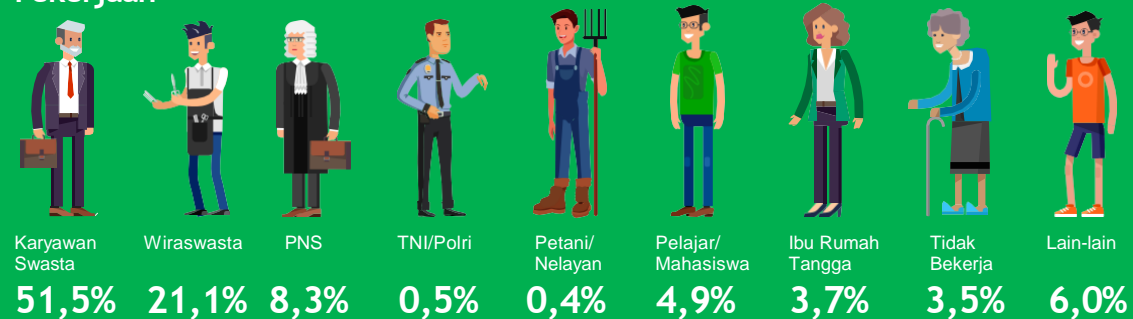
## Jenis Kelamin



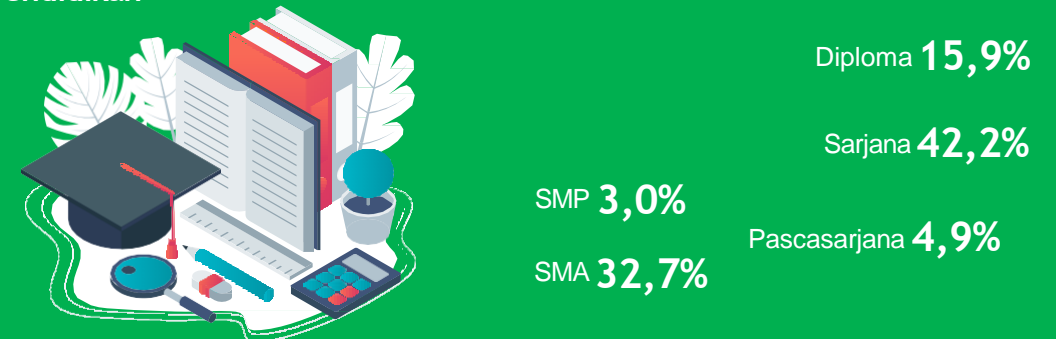
## Usia



## Pekerjaan

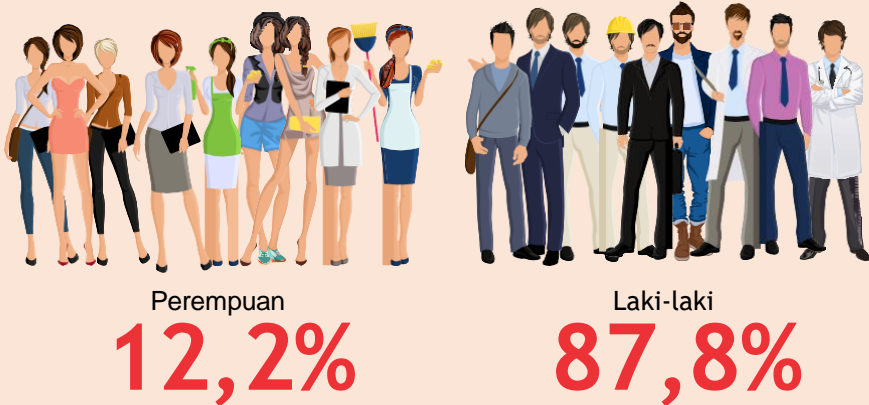


## Pendidikan



# Profil Responden (Eksper)

## Jenis Kelamin



## Usia



## Pendidikan

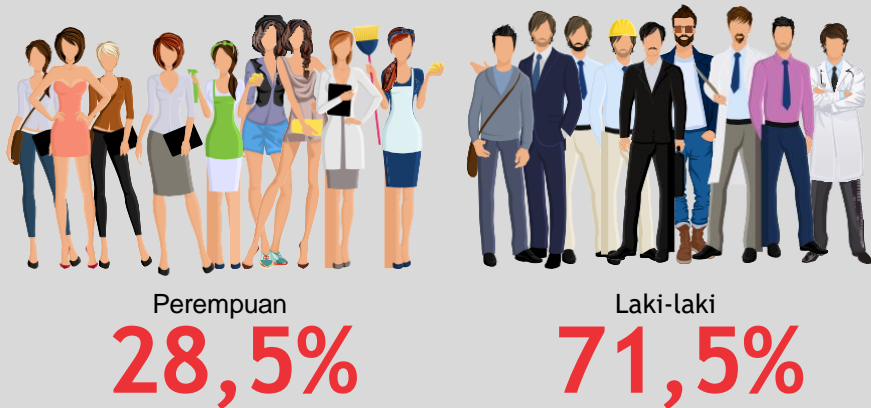


S1 Ke Bawah **49,6%**

Pascasarjana **50,4%**

# Profil Responden (Rata-rata)

## Jenis Kelamin



## Usia



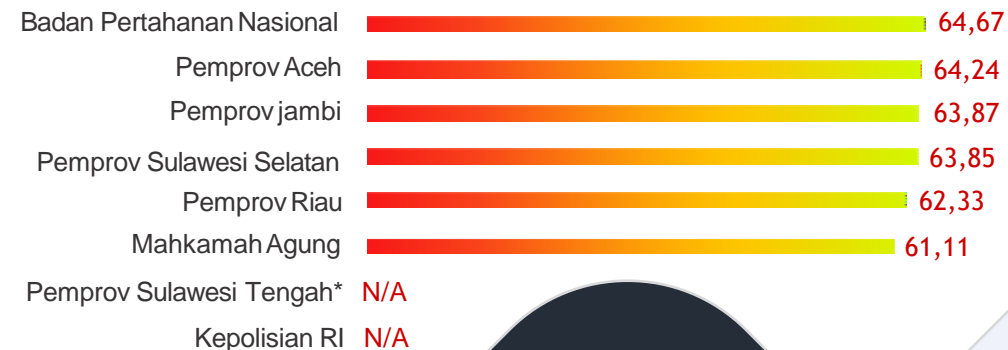
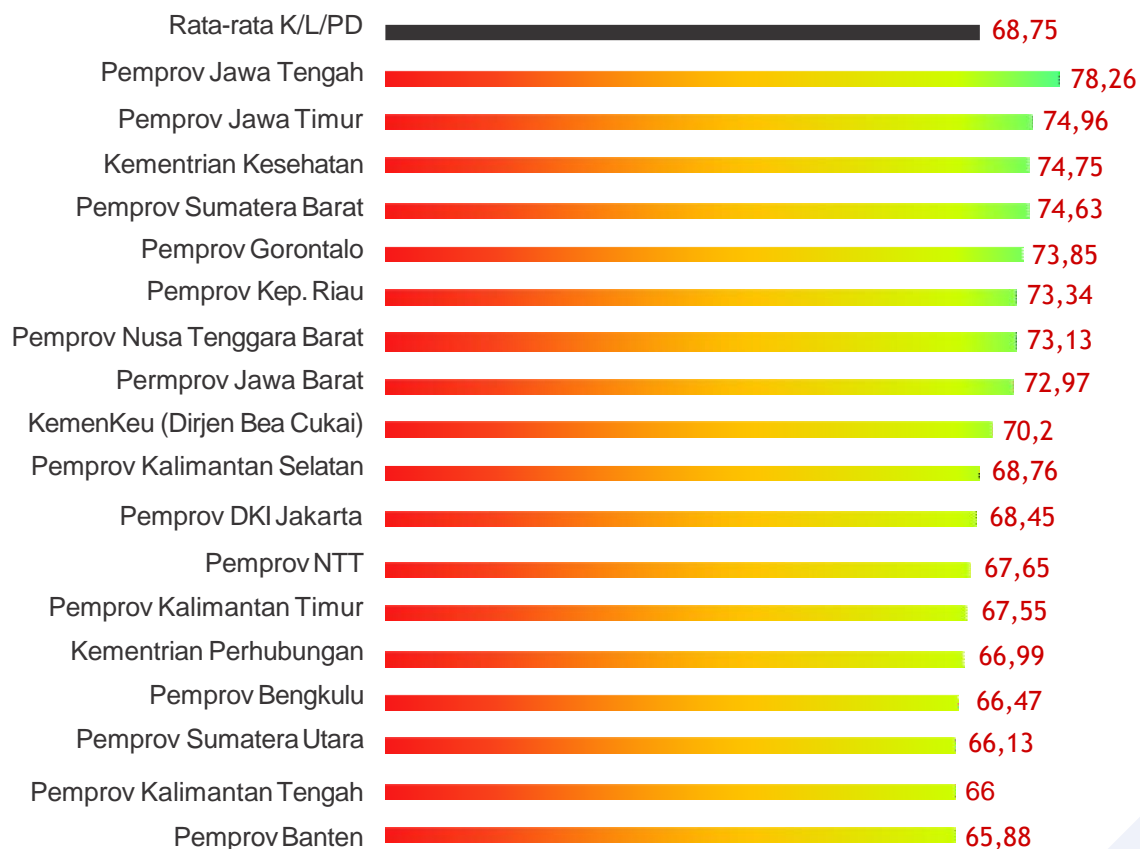
## Pendidikan



S1 Ke Bawah **69,9%**

Pascasarjana **30,0%**

# Indeks integritas 2018 pada 26 K/L/PD



Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas K/L/PD yang semakin baik

**Indeks tertinggi Pemprov Jawa Tengah**

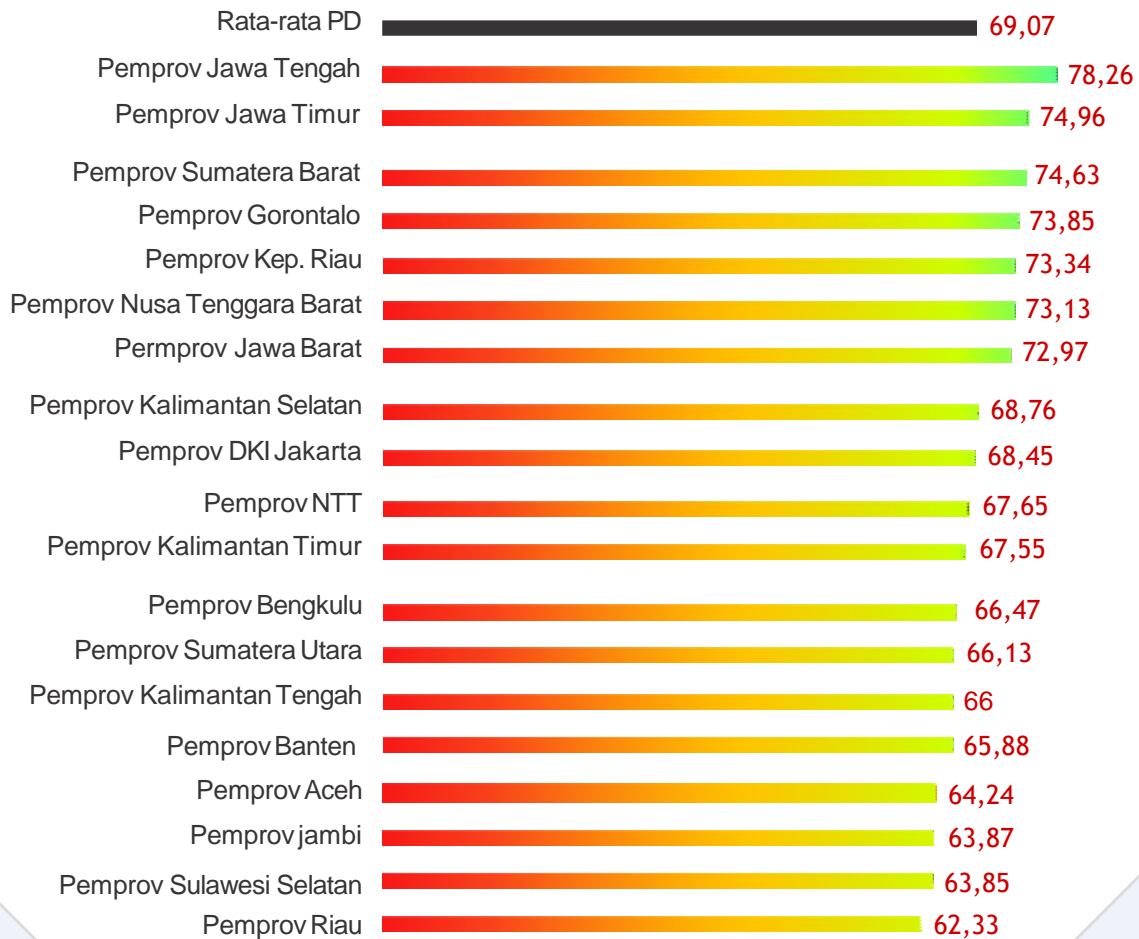
**Indeks terendah Mahkamah Agung**

N/A: Nilai Indeks Integritas Kepolisian RI tidak dapat ditampilkan karena kecukupan sampel internal tidak terpenuhi

N/A: Nilai Indeks Integritas Sulawesi Tengah tidak dapat ditampilkan karena kecukupan sampel eksternal tidak terpenuhi

# Indeks Integritas Pemerintah Daerah

## Indeks integritas Pemerintah Daerah



Indeks **tertinggi** dimiliki oleh  
**Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

Indeks **terendah** dimiliki oleh  
**Pemerintah Provinsi Riau**

*\* ) Nilai Indeks Sulawesi Tengah tidak dapat ditampilkan karena kecukupan sampel internal tidak terpenuhi*

# Indeks integritas K/L & PD

## Indeks integritas Kementrian/Lembaga



Indeks **tertinggi** dimiliki oleh  
**Kementerian Kesehatan**

Indeks **terendah** dimiliki oleh  
**Mahkamah Agung**

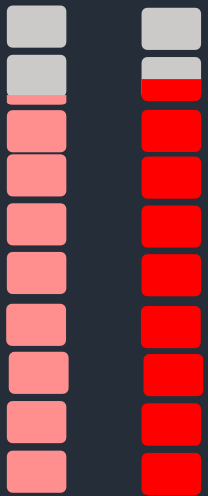
*\*) Nilai Indeks Integritas Kepolisian RI tidak dapat ditampilkan karena kecukupan sampel internal tidak terpenuhi*

# Hasil SPI Pandangan Pemangku Kepentingan

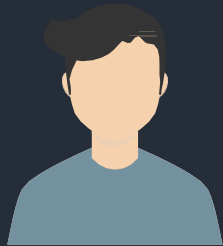


Pegawai

81 84

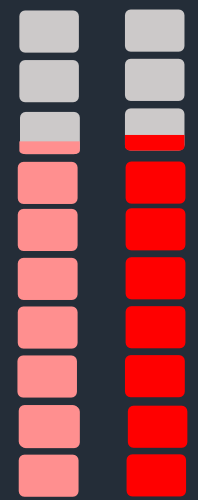


2017 2018



Pengguna  
Layanan

71 72

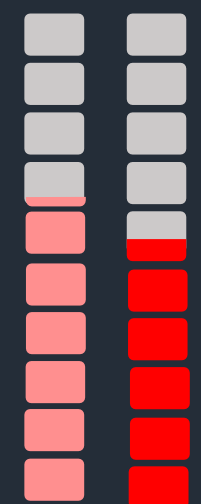


2017 2018



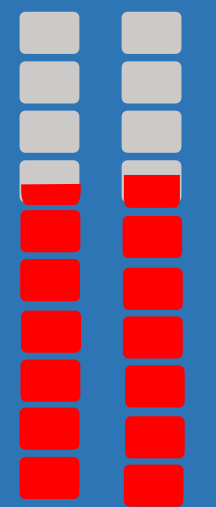
Eksper

62 54



2017 2018

66 68



2017 2018



# Gambaran Umum Permasalahan Integritas

## CALO



Sekitar **22 persen** responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan calo. Muncul disemua lembaga peserta. Tahun 2017 sebesar **17 persen**



Sekitar **25 persen** responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan nepotisme dalam penerimaan pegawai. Tahun 2017 sekitar **20 persen**

## NEPOTISME

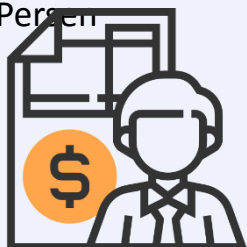
## GRATIFIKASI



**25%** Responden Pengguna layanan melihat / mendengar pegawai menerima suap /gratifikasi . Muncul disemua peserta. Tahun 2017 sebesar **30%**

## SUAP PROMOSI

Sekitar **5.6 persen** responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan suap dalam kebijakan promosi. Muncul di 87% peserta lembaga. Tahun 2017 4 Persen



Sekitar **21 persen** responden internal cenderung percaya bahwa suap/gratifikasi mempengaruhi kebijakan karir di lembaganya. Tahun 2017 30%



**2** dari **10** pegawai menyaksikan pelapor praktik korupsi di unit kerja dikucilkan, diberi sanksi atau karirnya dihambat, dan sejenisnya dalam 12 bulan terakhir

**2** dari **10** Pengguna layanan cenderung tidak percaya bahwa melaporkan korupsi akan mendapatkan perlindungan. Nilai sama 2017



## SISTEM ANTI KORUPSI



**Terima Kasih**

**2019**

**Direktorat Penelitian dan Pengembangan  
Kedeputian Bidang Pencegahan**